

HARIAN  
UNTUK UMUM

TERBIT SEJAK  
01 MARET 2011

PENDIRI:  
Ardi, S.Si, Apt

# Baubau Post

erani Beda - Kritis, Lugas, Independen

Baubaupost.com

Selasa  
19 Maret 2024

Eceran Rp 5000

Berlangganan Rp 100.000/ bulan

Info Langganan dan Iklan HP/WA: 082160543989

## Tabrak Undang-Undang ASN, Sekcam Kambowa dan Pj Kades Morindino Diduga Terlibat Politik Praktis di Butur



Sekcam Kambowa Buton Utara yang diberi tanda centang

Laporan: KASRUN

BUTUR, BP-Di tengah gejolak politik jelang Pilkada serentak November 2024, di Buton Utara muncul pergerakan yang mencurigakan. Beberapa oknum ASN, antara lain Sekcam Kambowa dengan inisial DR dan PJ. Kades Morindino dengan inisial KSW diduga terlibat dalam politik praktis.

Pj Bupati Buton Tengah Hadiri Tradisi Adat Bongka'a Tau Rumpun Ombobawulu



Pewarta: Ardi

BUTENG-BP-Pj Bupati Buton Tengah, Andi Muhammad Yusuf bersama forkopimda dan jajaran

pemerintah daerah Kabupaten Buton Tengah, menghadiri syukuran tradisi adat Bongka'a Tau masyarakat rumpun Ombonawulu berlang-

sung di lapangan ampera Kelurahan Bombonawulu Kecamatan Gu, Rabu (6/3/2024).

Lanjutkan ke Hal: 7

Sekda Minta Penegak Hukum Usut Foto-foto Sekcam Kambowa dan Pj Kades Morindino Terkait Balon Bupati Butur 2024

Peliput : Kasrun

BUTUR, BP-Sekda Butur Muh Hardy Muslim Persilahkan Penegak Hukum Selidiki Foto Sekcam Kambowa dan Pj Kades Morindino yang Diduga Terlibat Politik Praktis Balon Bupati Bu-



Sekda Butur Muh Hardy Muslim

Lanjutkan ke Hal: 7

Dr Muh Rasman Minta Kualitas Pangan Terjaga dan Aman Dikonsumsi

Pewarta: Amat Jr



Pj Walikota Baubau Dr Muh Rasman Manafi

BAUBAU, BP-Kota Baubau sebagai daerah yang sedang berkembang diikuti Usaha Kecil Menengah Mikro (UMKM) yang bertumbuh termasuk UMKM di bidang pangan. Meningkatkan UMKM di bidang

Lanjutkan ke Hal: 7

Pj Sekda La hardin Pimpin Rakor TPID Buton Selatan



Pewarta: Eron

BUSEL, BP- Pemerintah Kabupaten Buton Selatan terus berupaya dalam pengendalian inflasi daerah, Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah

(TPID) yang dipimpin langsung Pj. Sekretaris Daerah Buton Selatan La Hardin, S.Pd., MM didampingi Asisten Perencanaan dan Pembangunan Setda Buton Selatan Drs. Mz. Amril Tamim, M.Si, Staf Ahli

Bupati Buton Selatan Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Kaimudin, S.Ag., SH., MH, bertempat di Aula Rapat kantor Bupati Buton Selatan, Senin

Lanjutkan ke Hal: 7



Andina Latief, SKM  
DIREKTUR

SEGENAP PIMPINAN, REDAKSI, & KARYAWAN PT FAREN GRAFIKA

PENERBIT SURAT KABAR HARIAN (SKH) BAUBAU POST (www.baubaupost.com)

Mengucapkan :

Terimakasih Kepada Dewan Pers Yang Telah Menetapkan SKH Baubau Post (www.baubaupost.com) Sebagai Media Terverifikasi per Tanggal 30 Desember 2022



## Tabrak Undang-Undang ASN, Sekcam Kambowa dan Pj Kades Morindino Diduga Terlibat Politik Praktis di Butur

tur tahun 2024 pada Minggu, 10 Maret 2024. Dokumentasi berupa foto pertemuan tersebut telah beredar luas di media sosial.

Pj. Kades Morindino sebelumnya juga pernah menjadi sorotan publik karena melanggar norma dan kesopanan pada masa pemerintahan Abu Hasan. Meski demikian, ia kembali menjabat sebagai Pj. Kades. Perlakuan istimewa terhadap ASN yang bersang-

kutan menjadi sorotan, mengingat adanya indikasi cacat moralitas berdasarkan jejak digitalnya yang tidak baik.

Wakil Bupati Butur, Ahali, SH, MH, yang juga mantan Kasat Reskrim Wakatobi, menanggapi hal ini. Ia mengatakan, bahwa larangan keterlibatan ASN dalam politik praktis sudah jelas tercantum dalam undang-undang.

“Pasal 280 Ayat (2) UU Nomor 7 Tahun

2017 menyatakan bahwa ASN, Kepolisian, TNI, Kades, Perangkat Desa, dan BPD dilarang terlibat dalam aktivitas politik praktis,” tulis Wakil Bupati Ahali melalui WhatsAppnya, Selasa (12/03/2024).

Ahali juga menekankan, apabila ASN terbukti melibatkan diri dalam politik praktis, ia akan merekomendasikan penanganan kepada Bawaslu Kabupaten dengan tem-

busan ke Bawaslu Provinsi. Selain itu, pelanggaran tersebut juga akan dilaporkan ke Menpan RB, Mendagri, dan Ombudsman untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut, termasuk kemungkinan sanksi administratif atau pidana.

Hingga berita ini diterbitkan Pj. Kades Morindino belum membalas pesan WhatsApp yang dikirimkan wartawan ini. Sedangkan Sekcam Kambowa belum bisa dihubungi. (\*)

## Dr Muh Rasman Minta Kualitas Pangan Terjaga dan Aman Dikonsumsi

pangan restoran/ rumah makan, kantin sekolah dan penjaja makanan di sekitar sekolah dan komoditi pangan di lingkungan pasar maka harus tetap menjaga kualitas pangan dan aman untuk dikonsumsi.

Demikian dikatakan Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si saat memberikan sambutan pada rapat advokasi / kelembagaan Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD, pasar pangan aman berbasis komunitas dan pangan jajanan anak sekolah (PJAS)) aman di Kota Baubau tahun 2024 di aula kantor Wali Kota Baubau Palagimata Jumat (8/3/2024).

Menurut Dr Muh Rasman, keamanan penting bagi pangan sangat meningkatkan perekonomian secara menyeluruh. Pembangunan keamanan pangan harus dimulai dari individu,

keluarga maupun masyarakat. Jika ada permasalahan mengenai keamanan pangan maka harus segera ditanggulangi agar tidak berdampak luas pada kesehatan masyarakat.

Diungkapkan, pangan merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Pangan Nomor 18 tahun 2018 serta dijamin di dalam UUD Negara RI tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Pemerintah berkeajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang baik tingkat nasional maupun daerah termasuk pedesaan, hingga perseoran-

gan secara merata di wilayah NKRI sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya kelembagaan dan budaya lokal.

“Pangan yang aman, pengelola pasar juga mengawasi ketersediaan pangan yang aman di pasar sehingga masyarakat memperoleh pangan dari pasar dan juga anak sekolah dalam masa pertumbuhannya. Pemerintah Kota Baubau sangat bangga menyambut program Badan POM ini,” katanya.

Orang nomor satu di Kota Baubau ini berharap melalui rapat advokasi agar bekerja sama mendukung program Badan POM ini agar seluruh lapisan masyarakat Kota Baubau terbebas dari pangan yang tidak aman dan beresiko terhadap kesehatan sekaligus diharapkan kegiatan ini juga dapat mempercepat penurunan angka stunting. (\*)

## Sekda Minta Penegak Hukum Usut Foto-foto Sekcam Kambowa dan Pj Kades Morindino Terkait Balon Bupati Butur 2024

“Melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih support dan hibah masyarakat rumpun ombonawulu, yang diberikan kepada Pemerintah Buton Tengah, sehingga daerah ini dapat mekar sebagai syarat peletakan titik ibukota, dan berdiri megah kawasan pemerintahan bumi praja labungkari, yang beberapa waktu kedepan akan diresmikan”,ungkapnya.

Melalui momen yang berbahagia ini, kami memohon doa dari masyarakat rumpun ombonawulu dan para tetua adat, untuk senantiasa mendoakan pemerintah daerah Buton Tengah yang akan memasuki kantor Bupati Buton Tengah nanti, sehingga setiap aktifitas kegiatan dapat melahirkan kebijakan yang dapat mensejahterakan dan seluruh aparat sipil maupun masyarakat yang memanfaatkan kantor bupati selalu dalam lindungan Allah SWT. (\*)

“Ooo apalagi sudah begini, iya silahkan aparat turun investigasi,” tulis Sekda Butur Muh. Hardhy Muslim, via WhatsApp, Selasa (12/03/2024).

Sekda mengatakan bahwa jika kunjungan tersebut hanya dalam konteks menerima kunjungan ketua DPRD, itu tidak menjadi masalah selama tidak ada atribut partai atau sosialisasi salah satu bakal calon.

“Saya belum berani menjustifikasi kebenarannya

karena sebatas foto dan berita. Silakan dilakukan investigasi oleh aparat dan klarifikasi oleh terduga supaya semuanya jelas,” katanya.

Sebagai seorang ASN, Sekda Butur juga menghimbau kepada seluruh ASN agar tidak terlibat dalam politik praktis. “Hindari terlibat dalam dukung-mendukung salah satu bakal calon, terutama dalam jam kerja atau menggunakan fasilitas negara (kantor dan kendaraan dinas). Karena masih tanggung jawab atasan, kalau terbukti akan diberi teguran peringatan keras atau sanksi sesuai UU ASN. Namun, jika terjadi di luar jam kerja, sanksinya adalah pidana pemilu,” tambahnya.

Foto-foto yang tersebar di media sosial Facebook,

diunggah oleh akun Facebook Iyan Hutman Junior, memperlihatkan di rumah Sekcam Kambowa terpasang spanduk bertuliskan “Rumah Pemenangan Muhammad Rukman Basri”. Sedangkan Pj. Kades Morindino terlihat menerima salah satu kunjungan Bacabup Butur di rumah warga di Desa Morindino.

Hingga berita ini diterbitkan, Sekcam Kambowa, Derwun dan Pj. Kades Morindino belum memberikan keterangan terkait foto-foto mereka yang tersebar di Facebook.

Pj. Kades Morindino hingga berita ini diterbitkan belum membalas pesan WhatsApp yang dikirimkan media ini. Sedangkan Sekcam Kambowa belum bisa dihubungi. (\*)

## Pj Bupati Buton Tengah Hadiri Tradisi Adat Bongka'a Tau Rumpun Ombobawulu

Syukuran tradisi adat Bongka'a Tau masyarakat rumpun Ombonawulu tahun 2024 mengangkat tema “Merajut persatuan rumpun ombonawulu”.

Pj Bupati Buton Tengah, Andi Muhammad Yusuf dalam kesempatan ini mengatakan terima kasih, dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kecamatan Gu, panitia dan masyarakat rumpun ombonawulu yang telah mempersiapkan dan sukses melaksanakan kegiatan tahunan pada hari ini.

Pj Bupati, Andi Muhammad Yusuf menuturkan, acara Bongka'a adalah merupakan salah satu tradisi adat yang ditujukan masyarakat rumpun ombonawulu sebagai bentuk

rasa syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan hasil yang berlimpah baik hasil perkebunan dan perikanan.

“Kami berharap, bukan hanya instrumen budaya yang setelah dilaksanakan kemudian ditinggalkan, akan tetapi ritual yang terus berlanjut sampai generasi ke generasi. Menjadi Kalender daerah yang akan terus diselenggarakan, bahkan bila perlu dapat mengusulkan masuk dalam event tingkat nasioanal oleh Kementerian Pariwisata dan ekonomi kreatif RI”,kata Pj Bupati.

Sebagai wujud keseriusan mendukung ke-

giatan Bongka'a Tau, maka tahun 2024 Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Buton Tengah telah membentuk peraturan daerah nomot 4 tahun 2024 tentang perlindungan dan pelestarian warisan budaya Bongka'a Tau, Haroana Talaga, dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah. Ini merupakan bukti keseriusan Eksekutif dan Legislatif dalam menjaga warisan budaya. Maka kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung dan terus memelihara tradisi budaya dengan menjaga nilai-nilai sakral ini.

Di tambahkan, ikon kebanggaan masyarakat Buton

Tengah adalah berdiri megahnya kantor bupati Buton Tengah, di kawasan tanah rumpun ombonawulu.

“Melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih support dan hibah masyarakat rumpun ombonawulu, yang diberikan kepada Pemerintah Buton Tengah, sehingga daerah ini dapat mekar sebagai syarat peletakan titik ibukota, dan berdiri megah kawasan pemerintahan bumi praja labungkari, yang beberapa waktu kedepan akan diresmikan”,ungkapnya.

Melalui momen yang berbahagia ini, kami memohon doa dari masyarakat rumpun ombonawulu dan para tetua adat, untuk senantiasa mendoakan pemerintah daerah Buton Tengah yang akan memasuki kantor Bupati Buton Tengah nanti, sehingga setiap aktifitas kegiatan dapat melahirkan kebijakan yang dapat mensejahterakan dan seluruh aparat sipil maupun masyarakat yang memanfaatkan kantor bupati selalu dalam lindungan Allah SWT. (\*)

## Pj Sekda La hardin Pimpin Rakor TPID Buton Selatan

(04/02/2024).

Hadir para Kepala OPD, Staf Ahli Bupati Setda Buton Selatan, para Kabag Setda Buton Selatan, para Camat dan Kepala Desa se-Buton Selatan yang sempat hadir.

TPID merupakan kepanjangan dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah. TPID adalah sebuah tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi di daerah.

TPID merupakan tim yang bertugas memantau dan menyiaipkan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan inflasi khususnya di didaerah.

Cara mengatasi inflasi oleh pemerintah adalah dengan mengadakan Pasar Murah dan meningkatkan hasil produksi, mempermudah masuknya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat (tingkat upah),

menetapkan harga maksimum, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang. Kenaikan harga beberapa komoditas seperti telur, cabai, dan daging ayam juga berkontribusi terhadap terjadinya inflasi di Indonesia dan terkhusus di Kab. Buton Selatan.

Inflasi terjadi disebabkan oleh naiknya permintaan total terhadap barang dan jasa. Kenaikan biaya

produksi atau cost push inflation. Kenaikan biaya produksi menyebabkan barang yang ditawarkan mengalami kenaikan harga. Meningkatnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat atau money in circulation. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. (\*)

## Kemenko Polhukam Kawal Pemilu Tetap Kondusif Hingga 20 Maret



### Laporan: Hasim

JAKARTA, BP-Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) memastikan bahwa pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 secara umum berjalan kondusif. Meskipun ada permasalahan terjadi, termasuk terkait rekapitulasi suara. Demikian dikatakan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam RI, Mayjen TNI Heri Wiranto dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) dengan tema "Pemilu 2024 Mengawal Demokrasi Hasil Pemilu"™, Rabu (12/3).

"Hasil pemantauan dan monitoring, tahapan Pemilu secara keseluruhan masih berjalan dengan baik," ujar Heri.

Heri menegaskan bahwa Kemenko Polhukam bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan terus memantau tahapan Pemilu hingga batas waktu perhitungan suara terakhir pada 20 Maret mendatang.

Karenanya, agar proses rekapitulasi oleh KPU dapat sele-

sai tepat waktu pada 20 Maret, Kemenko Polhukam juga terus berkoordinasi dengan kementerian maupun lembaga terkait lainnya untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar.

"Kami akan terus memantau dan mengawal proses Pemilu ini agar berjalan dengan baik. Kalau ada temuan-temuan pelanggaran yang harus diselesaikan, tentu ada kewenangan di masing-masing lembaga sesuai UU Pemilu," ujarnya.

Lebih lanjut Heri mengatakan, tak dapat dipungkiri, sejauh ini masih ada sejumlah kerawanan dalam tahapan Pemilu 2024. Heri menyebut, kerawanan-kerawanan itu di antaranya gangguan keamanan dari kelompok tertentu di wilayah Papua dan bencana banjir yang terjadi di beberapa wilayah seperti Demak dan Jakarta.

Meski begitu, Heri memastikan, permasalahan kerawanan-kerawanan tersebut berdasarkan catatan pihaknya telah teratasi dengan baik.

"Yang pertama keamanan karena gangguan dari kelompok-kelompok separatis di Papua, yakni di Paniai, Yahukimo,

Puncak Jaya, dan Intan Jaya. Bencana juga seperti banjir di Demak dan Jakarta. Semuanya sudah dilakukan upaya-upaya dan sudah bisa diatasi sehingga Pemilu bisa diselenggarakan," ujarnya.

Lebih jauh Heri menuturkan, secara umum, pemerintah akan mengawal penyelenggaraan pemilu dan memastikan tahapan Pemilu berjalan baik sampai batas waktu yang telah ditentukan. Mulai dari mengantisipasi potensi kerawanan Pemilu yang bisa terjadi lagi, hingga penyebaran-penyebaran informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Koordinasi yang erat dengan kementerian dan lembaga terkait dilakukan untuk memastikan bahwa Pemilu 2024 berjalan dengan integritas dan transparansi, sebagai wujud nyata dari demokrasi yang sehat dan matang.

"Kita pastikan akan terus memonitoring seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu dan memastikan tahapan Pemilu itu dapat berjalan baik. Sehingga diharapkan pada 20 Maret proses penghitungan suara dapat selesai betul-betul bisa dilaksanakan," katanya. (\*)

## Kemenko Polhukam Kawal Pemilu Tetap Kondusif Hingga 20 Maret

### Laporan: Hasim

JAKARTA, BP-Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) memastikan bahwa pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 secara umum berjalan kondusif. Meskipun ada permasalahan terjadi, termasuk terkait rekapitulasi suara. Demikian dikatakan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam RI, Mayjen TNI Heri Wiranto dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) dengan tema "Pemilu 2024 Mengawal Demokrasi Hasil Pemilu"™, Rabu

(12/3). "Hasil pemantauan dan monitoring, tahapan Pemilu secara keseluruhan masih berjalan dengan baik," ujar Heri.

Heri menegaskan bahwa Kemenko Polhukam bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan terus memantau tahapan Pemilu hingga batas waktu perhitungan suara terakhir pada 20 Maret mendatang.

Karenanya, agar proses rekapitulasi oleh KPU dapat selesai tepat waktu pada 20 Maret,

Kemenko Polhukam juga terus berkoordinasi dengan kementerian maupun lembaga terkait lainnya untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar.

"Kami akan terus memantau dan mengawal proses Pemilu ini agar berjalan dengan baik. Kalau ada temuan-temuan pelanggaran yang harus diselesaikan, tentu ada kewenangan di masing-masing lembaga sesuai UU Pemilu," ujarnya.

Lebih lanjut Heri mengatakan, tak dapat dipungkiri, sejauh ini masih ada sejumlah kerawanan dalam tahapan Pemilu 2024. Heri me-

## Bawaslu Tindak 63 Kasus Pelanggaran Pidana Pemilu dan Pelanggaran Lainnya



Pewartu: Hadi

JAKARTA, BP- Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, menegaskan bahwa pelanggaran pidana Pemilu akan tetap ditindaklanjuti dengan serius, meskipun memiliki karakteristik khusus yang tidak mengikuti KUHAP.

Rahmat membeberkan data Bawaslu dari tahap awal Pemilu 2024 hingga saat ini terdapat 266 kasus pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu. Selain pelanggaran kode etik, terdapat juga 140 kasus pelanggaran hukum lainnya yang tercatat.

"Ini termasuk pelanggaran administrasi yang telah terbukti sebanyak 71 kasus dan pelanggaran pidana sebanyak 63 kasus. Hampir setengah dari kasus pidana ini terbukti, menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk penegakan hukum yang lebih efektif dalam pemilu," ujarnya dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema "Mengawal Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu", Rabu (13/3).

Dari sisi pelaporan, ia melanjutkan, ada sekitar 1.500 laporan masuk, di tambah dengan 700 temuan oleh Bawaslu. Menurutnya,

nyebut, kerawanan-kerawanan itu di antaranya gangguan keamanan dari kelompok tertentu di wilayah Papua dan bencana banjir yang terjadi di beberapa wilayah seperti Demak dan Jakarta.

Meski begitu, Heri memastikan, permasalahan kerawanan-kerawanan tersebut berdasarkan catatan pihaknya telah teratasi dengan baik.

"Yang pertama ke-

proses penanganan kasus berdasarkan laporan maupun temuan itu menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu. Namun, Rahmat menekankan bahwa Bawaslu berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap kasus yang memiliki bukti yang cukup, termasuk kasus yang viral di media sosial maupun yang tidak.

Hal ini dikarenakan penanganan kasus ini mencerminkan upaya untuk mempertahankan integritas pemilu dan memastikan bahwa setiap pelanggaran mendapatkan tindakan sesuai hukum yang berlaku.

Di sisi lain, ia pun mengakui bahwa celah untuk pelanggaran selalu ada, mengingat faktor manusia yang terlibat dalam pesta demokrasi dengan skala yang sangat besar ini. Namun, yang terpenting bagi Bawaslu adalah bagaimana pelanggaran tersebut dapat mempengaruhi hasil pemilu.

memastikan tahapan Pemilu berjalan baik sampai batas waktu yang telah ditentukan. Mulai dari mengantisipasi potensi kerawanan Pemilu yang bisa terjadi lagi, hingga penyebaran-penyebaran informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Koordinasi yang erat dengan kementerian dan lembaga terkait dilakukan untuk memastikan bahwa Pemilu 2024 berjalan

"Setiap suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan setiap suara dalam rekapitulasi harus memiliki bobot yang sama dalam menentukan hasil akhir," tegas dia.

Sengketa Pemilu Dalam sejarah pemilu di Indonesia, Rahmat menyebutkan sengketa Pemilihan Legislatif (Pileg) selalu mendominasi jika dibandingkan dengan sengketa yang menyangkut Pemilihan Presiden (Pilpres).

Secara khusus, ia pun menyoroti kasus perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kuala Lumpur, Malaysia. Ia memaparkan bahwa terdapat indikasi pelanggaran yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Di Kuala Lumpur, jumlah pemilih yang terverifikasi hanya 68 ribu dari total sekitar 440 ribu WNI. Kasus ini pun menjadi titik awal yang mengungkap adanya masalah

pencaatan warga negara Indonesia di luar negeri, sehingga memerlukan evaluasi mendalam terhadap metode pos yang digunakan.

"Padahal Presiden Jokowi pernah menekankan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak boleh mengabaikan aspek administratif yang menjadi pondasi penting dalam penyelenggaraan pemilu," tegasnya.

Sejak 2008, lanjut Rahmat, Bawaslu telah mengawal proses pemilu dan berhasil membawa tindak pidana pemilu ke pengadilan, termasuk kasus di Kuala Lumpur. Hanya saja, untuk kasus yang di luar negeri kompleksitas tindak pidananya menambah kerumitan dalam penanganan kasus dimaksud.

Oleh karena itu, ia pun mengaku merasa bangga dapat membawa kasus di Kuala Lumpur masuk ke tahap pengadilan.

"Dalam sejarah pengawalan pemilu sejak 2008, tindak pidana pemilu di luar negeri dapat ke pengadilan, "pecah telur"™ sekarang!" tuturnya dengan bangga. (\*)

dengan integritas dan transparansi, sebagai wujud nyata dari demokrasi yang sehat dan matang.

"Kita pastikan akan terus memonitoring seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu dan memastikan tahapan Pemilu itu dapat berjalan baik. Sehingga diharapkan pada 20 Maret proses penghitungan suara dapat selesai betul-betul bisa dilaksanakan," katanya. (\*)

<https://www.baubaupost.com>

Selasa, 19 Maret 2024

## Entry Meeting LKPD 2023, Pemprov Sultra Target Pertahankan WTP



Pewarta: Mashuri

**Kendari - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kembali menargetkan predikat pengelolaan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tentunya melalui kualitas penyusunan LKPD Provinsi yang kian meningkat dari tahun ke tahun.**

Hal ini diungkapkan Sekda Sultra, Drs. H Asrun Lio., M.Hum., Ph.D., tepatnya usai mewakili Pj. Gubernur Sultra, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto., S.I.K., M.H pada pertemuan Entry Meeting Pemeriksaan LKPD dan Koordinasi Pemeriksaan LKKL dan LKPD tahun 2023 oleh BPK RI, belum lama ini, di Jakarta.

Sekda Sultra, Selasa (12/3/2024) mengatakan, meskipun Pemprov. Sultra telah berhasil meraih opini WTP yang diterima pada Bu-

lan Juni Tahun 2023 lalu dan merupakan WTP yang ke 10, tidak lantas Pemprov. Sultra berhenti untuk meningkatkan kualitas pelaporan serta tata kelola keuangan pemerintah daerah Provinsi Sultra yang transparan dan akuntabel.

“Menuju tata kelola pemerintahan maupun keuangan yang akuntabel dan transparan merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Sultra. Hal ini juga sejalan dengan upaya BPK RI yang mengusung tema Entry Meeting Pemeriksaan LKPD dan Koordinasi Pemeriksaan LKKL dan LKPD tahun 2023, dengan menegakkan nilai-nilai independensi, integritas, dan

profesionalisme,” ucap Jenderal ASN Provinsi Sultra ini.

Sekda Sultra ini menambahkan, selain target meraih kembali opini WTP, yang terpenting adalah bagaimana menjaga niat baik semua pihak yang terkait dalam sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan, untuk terus bekerja dan berkomitmen sehingga good governance and clean government dapat diwujudkan melalui kualitas pelaporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. (\*)

## Pemprov Sultra Gotong Royong Bersihkan Pasca Banjir Kendari

Pewarta: Amran

KENDARI, BP-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) menurunkan personilnya untuk membantu pembersihan sampah dan lumpur pasca banjir di Kecamatan Kampung Salo Kota Kendari, Senin (11/03/24).

Hal ini sebagai tindak lanjut instruksi Penjabat (Pj.) Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto untuk terus memantau penanganan dampak banjir saat meninjau lokasi terdampak banjir di Kampung Salo, Sabtu (09/03/24) lalu.

Gotong royong pembersihan dipimpin Sekda Provinsi Sultra Asrun Lio bersama-sama personil Satpol PP, Dinas Cipta Karya, PUPR, Dinas SDA &



Binamarga, Damkar Kota Kendari, serta menggandeng Mahasiswa UHO, dan para Relawan yang berjumlah kurang lebih 150 orang.

“Atas instruksi Bapak Pj. Gubernur, hari ini kami terjun langsung ke lapan-

gan untuk membantu warga membersihkan sampah dan lumpur pasca banjir. Alhamdulillah para Mahasiswa dan Relawan turut serta juga dalam pembersihan ini,” ujar Asrun.

Teragenda bahwa kegiatan ini akan ter-

us dilakukan hingga sampah dan lumpur yang menumpuk dapat dibersihkan.

“Dampak banjir yang membawa endapan lumpur dan sampah membuat aktivitas warga terganggu, hal ini harus menjadi perhatian penuh dari selu-

## Pasca Banjir, Pemprov Sultra Tangani Tanggul Longsor Dan Sedimentasi Akibat Banjir



Pewarta: Lisna

KENDARI, BP-Bencana banjir di Kota Kendari mengakibatkan ruas jalan amblas serta beberapa tanggul longsor dan sedimentasi akibat banjir, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra menggandeng kerjasama dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari untuk penanganannya.

Hal itu diungkapkan Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto ditemui saat meninjau secara langsung Jalan S. Parman yang amblas dan Lorong Teplan Kota Kendari, Rabu (13/03/24).

Dari hasil peninjauan lapangan, teridentifikasi adanya jalan yang amblas, tanggul yang longsor termasuk aliran sungai yang tersedimentasi akibat banjir yang harus dibersihkan, yakni :

1. Sepenggal ruas di jalan S. Parman, di depan Kantor DPM PTSP : Jalan amblas akibat banjir ;
2. Sungai Teplan

Benu Benua, terdapat 4 (empat) titik tanggul sungai yang longsor. Kerusakan bervariasi, terparah sepanjang 75 meter, selanjutnya 50 meter, 20 meter, dan ada juga yang rusak sepanjang 5 meter. Nantinya tanggul tersebut akan diperbaiki dan dikembalikan ke fungsinya semula;

3. Sungai Lasolo samping RS Santa Anna : Tanggul jebol sepanjang 25 meter;
4. Kampung Salo : Tanggul jebol ;
5. Sungai Bonggoeya belakang Pasar Panjang : Tanggul sungai yang belum selesai dibangun oleh Pemkot Kendari.

“Kelima titik ini nantinya diperbaiki dan akan dikembalikan ke fungsi semula,” ujar Pj Gubernur.

Pj Gubernur juga mengungkapkan kondisi di lapangan, “Sempitnya akses jalan masuk membuat excavator tidak bisa masuk ke lokasi. Nanti akan digunakan jack hammer yang tentunya akan menambah waktu

dalam proses penyelesaiannya,” ungkapnya.

Andap menambahkan, “hal ini harus dilakukan segera mengingat intensitas curah hujan relatif tinggi beberapa waktu kedepan apabila merujuk pada prakiraan cuaca BMKG,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BWS IV Sulawesi Kendari Adi Umar Dani mengatakan akan mendukung sepenuhnya rencana normalisasi sungai pasca banjir ini.

“Ijin Pak Pj Gubernur, kami dari BWS IV Sulawesi Kendari akan mendukung sepenuhnya rencana ini, dan Insya Allah dalam waktu dekat kelima titik ini akan segera dikerjakan,” kata Dani.

Turut mendampingi Pj Gubernur yakni Kepala BWS IV Sulawesi Kendari, Asisten I, Kadis Cipta Karya, Kadis SDA dan Binamarga, Ka Bappeda, Kasatpol PP, Karo Kesra, dan segenap Pegawai dari Pemprov Sultra dan BWS IV Sulawesi Kendari. (\*)

ruh komponen untuk Saudara-Saudara kita warga terdampak banjir hingga sampah dan lumpur dampak dibersihkan,” kata Asrun.

Dalam kesempatan ini, Sekda Provinsi Sultra juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama membantu pembersihan pasca banjir sehingga Saudara-Saudara yang terdampak dapat menjalani Bulan Suci Ra-

madan 1445 H dengan tenang dan bersih.

“Atas nama Pemerintah Provinsi, saya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama ber-gotong royong membantu pembersihan pasca banjir di Kota Kendari. Hal ini semata-mata sebagai bentuk kepedulian kita, agar Saudara-Saudara kita yang terdampak dapat menjalani Bulan Suci

Ramadan dengan tenang dan bersih,” ucap Sekda Provinsi Sultra.

“Kami juga mengajak Pegawai Pemrov untuk mengumpulkan pakaian layak pakai pada saat apel pagi Rabu mendatang, selanjutnya akan kami salurkan kepada warga terdampak. Insya Allah hal ini dapat membantu meringankan beban masyarakat,” tutup Asrun. (\*)

## Pembeli Minim, Gedung Pasar Kecamatan Bonegunu di Buton Utara Terbengkalai



### Laporan : Kasrun

BURANGA, BP- Gedung pasar di Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara, hingga saat ini masih terbengkalai dan belum difungsikan. Pantauan terbaru dari media ini pada 13 Maret 2024 menunjukkan bahwa kompleks pasar tersebut sudah ditumbuhi rumput tinggi.

Keberadaan gedung pasar yang seharusnya menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat setempat ini telah menjadi ironi. Seharusnya, gedung tersebut menjadi tempat ramai dengan berbagai transaksi jual beli, namun kini hanya menjadi pemandangan yang memprihatinkan.

Belum adanya tindakan untuk mengaktifkan kembali gedung pasar ini menimbulkan pertanyaan dari masyarakat. Sebagai

aset publik, pengelolaan yang baik harus dilakukan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak.

Semoga pihak terkait segera mengambil langkah yang tepat untuk mengembalikan fungsi gedung pasar ini demi kesejahteraan masyarakat Kecamatan Bonegunu khususnya.

Camat Bonegunu, Junaidin mengatakan, penyebab gedung pasar tersebut tidak difungsikan karena pembelinya sangat minim.

“Salah satu kendalanya adalah pembelinya sedikit sehingga para penjual juga masih malas untuk membuka kios-kiosnya,” tulis camat Bonegunu, Junaidin via WhatsAppnya, Rabu (13/03/2024).

Kurangnya pembeli di pasar Kecamatan

Bonegunu kata Junaidin, karena sebagian masyarakat lebih banyak fokusnya di pasar-pasar Desa yang ada seperti pasar Desa Gunung Sari dan pasar Buranga yang sudah lama berjalan sebelum ada pasar Kecamatan.

Dalam upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, Junaidin mengaku telah melakukan koordinasi dengan beberapa desa tetangga dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan saat Musrenbang Kecamatan yang lalu.

“Dan insyaAllah dari hasil koordinasi kami dengan beberapa desa tetangga dan pihak Disperindag saat Musrenbang Kecamatan yang lalu akan dilakukan pertemuan khusus untuk membicarakan langkah-langkah selanjutnya terkait Pasar Kecamatan yang ada,” tutupnya. (\*)

## Pemkab Buteng Gelar Pasar Murah Jelang Ramadhan 1445 Hijriah



### Laporan : Ardi

**BUTENG, BP-**Dalam rangka menjaga stabilisasi pasokan dan Harga pangan terus bergerak naik menjelang Bulan Ramadhan 1445 Hijriah. Menyikapi hal tersebut Pemerintah Kabupaten Buton Tengah bergerak cepat untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok.

Pemkab Buton Tengah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) kerja sama dengan Bulog Divre Baubau menggelar pasar murah di gedung kesenian Mawasangka, Kamis (7/3/2024).

Pj Bupati, Andi Muhammad Yusuf dalam pernyataan

nya, mengatakan bahwa pemerintah daerah sangat peduli terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menghadapi moment penting seperti Bulan Ramadhan.

Pasar murah tersebut menawarkan dua komoditas pangan, yaitu beras dan gula pasir.

“Jumlah beras dan gula pasir yang disiapkan pada pasar murah ini adalah 9 ton, yang menjangkau 900 KK”, demikian kata Pj Bupati Buton Tengah, Andi Muhammad Yusuf saat membuka pasar murah.

Pj Bupati berharap, dengan kegiatan pasar murah

ini dapat membantu warga masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau menjelang Ramadhan.

“Jika nanti belum mendapatkan apa yang dicari pada pasar murah ini, untuk bersabar menunggu pasar murah berikutnya. Pemerintah daerah melalui Dinas Perindag dan Dinas Pangan, akan terus memantau gejala kenaikan harga sembako di pasar”, tutupnya. (\*)

## Bunda Paud Buton Dikukuhkan

### Pewartanya: Rahman

BUTON, BP-Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, Asnawi Jamaluddin, S.Pd. MSi berharap pembinaan PAUD di Kabupaten Buton bisa berjalan dengan baik setelah dilantik Bunda PAUD Buton, Ny. Dra Andi Asniwati Mustari, beserta jajarannya.

Hal ini disampaikan saat pengukuhan Bunda PAUD Kabupaten Buton yang juga Ketua TP PKK Buton beserta ibu-ibu pokja pengurus PAUD Kabupaten Buton oleh Bunda Paud Provinsi, Ny. Dra Wa Ode Munanah Asrun Lio dengan mengusung tema “Bunda PAUD” sebagai tokoh/rol model bagi pendidik anak usia dini dalam mewujudkan generasi yang beradab, berkarakter dan berbudaya”, di Aula Kantor Bupati

Buton, Rabu, 6 Maret 2024

“Pendidikan Anak Usia Dini merupakan hal yang saat ini harus kita perhatikan karena di tahun 2045 nanti kita akan dihadapkan dengan tantangan besar yaitu mewujudkan indonesia emas sebagai negara maju yang mana sumber daya manusianya harus kita siapkan sejak dini,” ungkapnya.

Dikatakannya, untuk mewujudkan itu harus kita siapkan sejak dini agar lahir sumber daya manusia yang unggul, berkualitas dan memiliki karakter

Sekda Buton juga berharap Bunda Paud yang baru saja dikukuhkan bisa mengambil peran penting dalam menghadapi isu nasional yang saat ini dihadapi.

“Kita dihadapkan dengan tiga masalah nasional yaitu masalah stunting, inflasi dan

kemiskinan ekstrem semoga Pembina Bunda Paud dapat mengambil peran penting utamanya dalam upaya menurunkan angka stunting di Buton,” tuturnya.

Sekda Buton juga menyinggung kesejahteraan tenaga pendidik di sekolah swasta yang dianggap tidak mendapat kesempatan yang sama dengan tenaga pendidik atau guru yang ada di sekolah negeri

“Mereka selama ini yang dibina swasta tidak bisa mengikuti seleksi PNS atau PPPK beda sama guru-guru di sekolah negeri padahal mereka sama-sama mengajar, membina dan mendidik anak bangsa tapi mendapat perlakuan yang berbeda,” ungkapnya.

Sekda Buton berharap agar hal ini bisa menjadi perhatian Bunda Paud Buton dan

juga dinas Pendidikan agar yayasan yang dibina oleh lembaga swasta itu segera dinegerikan supaya para guru-gurunya ada peluang untuk mendapat kesempatan dan kesejahteraan yang sama dengan guru sekolah negeri.

Sejalan dengan apa yang disampaikan Sekda Buton, bunda Paud Provinsi juga mengatakan tugas bunda Paud ini adalah tugas yang sangat mulia karena ini adalah fondasi atau dasar kita bisa melakukan tugas-tugas selanjutnya, melahirkan generasi emas indonesia karena dipundak kitalah terletak masa depan generasi penerus kita.

“Kita harus bangga dikasih kepercayaan untuk melahirkan generasi emas dan tugas yang paling penting untuk kita sebagai bunda paud adalah mensukseskan penurunan angka stunting karena ini berkaitan dengan 10 program



PKK,” tuturnya.

Ny. Munanah Asrun juga menyampaikan TP PKK dan Dharma Wanita Provinsi memberikan dukungan pada pemerintah dalam hal menurunkan prevalensi stunting di Sulawesi Tenggara.

“Di antara kabupaten dengan angka stunting tertinggi kami disuruh memilih dan kami memilih lokasi di Desa Sampuabalo dengan 53 anak stunting yang mengalami keterlambatan pertumbuhan

fisik dan perkembangan otak,” katanya.

Ketua DWP provinsi Sultra ini mengatakan keberhasilan menurunkan prevalensi stunting di Sampuabalo akan dijadikan sampel yang akan digunakan untuk menjadi dasar penurunan stunting di Kabupaten Buton

Ia juga meminta kepada OPD terkait dan seluruh stakeholder untuk bekerjasama dan menurunkan angka stunting di Kabupaten

Buton.

“Mari kita bahu membahu bekerja sama kepada OPD terkait khususnya tadi bunda-bunda Paud yang sudah dilantik untuk bisa mewujudkan indonesia generasi emas di tahun 2045 mendatang,” pungkasnya.

Dalam kegiatan ini sekaligus dirangkaikan dengan pagelaran tari dan fashion show untuk siswa Taman Kanak-kanak se Kabupaten Buton. (\*)

## Kemendikbudristek Kembali Selenggarakan Seleksi ASN Guru PPPK Tahun 2024 dengan Formasi 419.146 Guru

**Laporan: Andina L**  
 JAKARTA, BP- Dalam rangka persiapan pelaksanaan pengadaan ASN tahun 2024 di lingkungan instansi pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan ASN Tahun Anggaran 2024 di Jakarta pada Kamis (14/3).

Pada kesempatan tersebut, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, menyatakan apresiasi dan ucapan terima kasihnya atas kolaborasi yang telah terjalin dengan baik dengan KemenPANRB dan Kementerian/Lembaga terkait dalam penyeleng-

garan seleksi Guru ASN PPPK sejak 2021.

“Terselenggaranya Seleksi Guru ASN PPPK tentu melibatkan gotong royong dan kolaborasi yang erat antara Kemendikbudristek dengan KemenPANRB, BKN, LAN, serta kementerian/lembaga terkait lainnya. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih kepada KemenPANRB atas kesempatan yang diberikan kepada Kemendikbudristek sebagai instansi pembina dan instansi pemerintah untuk kembali membuka usulan formasi guru ASN PPPK 2024,” ujar Mendikbudristek dalam sambutannya.

Pelaksanaan seleksi Guru ASN PPPK merupakan wujud komitmen Kemendikbudristek dalam menjalankan arahan Presiden Joko Widodo dalam mengalo-

kasikan 2,3 juta formasi ASN, di mana pada tahun 2024 masih terdapat 419.146 formasi guru ASN PPPK.

Kemendikbudristek senantiasa mendorong pemenuhan kebutuhan guru ASN PPPK di sekolah negeri. Sampai dengan 2023, Kemendikbudristek telah meluluskan 774.999 guru ASN PPPK. Kebijakan ini akan terus dilakukan pada tahun 2024 dalam rangka pemenuhan kebutuhan guru ASN di Sekolah Negeri melalui seleksi guru ASN PPPK.

“Dalam upaya untuk mewujudkan cita-cita gerakan Merdeka Belajar, yakni meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, kami akan meneruskan kebijakan perekrutan guru ASN PPPK. Pada tahun ini, kami

akan melanjutkan pemenuhan kebutuhan guru ASN di sekolah negeri melalui Seleksi Guru ASN PPPK. Adapun kuota yang perlu dipenuhi tahun ini adalah sebanyak 419.146 guru ASN PPPK sehingga target 1 juta guru Insya Allah dapat terpenuhi,” terang Mendikbudristek.

Pada kesempatan yang sama, Mendikbudristek juga menyampaikan kebutuhan usulan formasi PPPK untuk Tenaga Administrasi Sekolah dan Pengawas Sekolah. Untuk tahun ini, terdapat 18.729 (delapan belas ribu tujuh ratus dua puluh sembilan) formasi Pengawas Sekolah Jenjang Ahli Muda yang dapat dipenuhi melalui ASN PPPK. (\*)



Mendikbudristek Nadiem Makarim

kerasan serta Satuan Tugas.

“Dengan gotong royong semua pihak, kita mampu menghapus tiga dosa besar pendidikan dan memerdekakan anak-anak Indonesia dari resiko kekerasan,” tegas Nadiem.

Saat ini sebanyak 94,89% satuan pendidikan jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB dan 74,86% satuan pendidikan jenjang PAUD serta Kesetaraan telah membentuk TPPK. Selain itu, telah tercatat 50% provinsi yang sudah membentuk Satgas, serta 60,5% Kabupaten/Kota yang memiliki Satgas. Untuk mempercepat pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Satgas PPKSP), Kemendikbudristek membutuhkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat.

“Mari bergerak bersama mewujudkan satuan pendidikan yang merdeka dari kekerasan, untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, berkebinekaan, dan aman bagi semua guna mewujudkan cita-cita merdeka belajar,” ucap Nadiem.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal DWP, Dewi Arif Hakim, mewakili Ketua Umum DWP Franka Makarim, men-

gatakan bahwa syarat paling utama dan mendasar bagi anak-anak Indonesia untuk bisa belajar dengan baik adalah menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman. “Semua elemen pendidikan memiliki tugas bersama untuk terlibat dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan,” ucapnya.

Dewi menyebut, di rumah, anak-anak bisa diberi edukasi tentang bentuk-bentuk kekerasan kepada seluruh anggota keluarga. Selain itu, para pemangku kepentingan harus mengawal implementasi Permen-dikbudristek PPKSP guna memastikan satuan pendidikan di seluruh Indonesia merdeka dari kekerasan.

“Kita perlu memastikan bahwa sekolah dan daerah tempat anak kita belajar telah membentuk TPPK dan Satgas PPKSP. Selain itu, juga memastikan bahwa tim yang sudah dibentuk menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan yang diamanatkan oleh Permendikbudristek PPKSP,” ujar Dewi.

Selanjutnya, Dewi juga menyampaikan bahwa DWP Pusat akan menjadikan pencegahan dan penanganan kekerasan sebagai salah satu program nasional mereka, yang harapannya juga ikut didukung dan dijalankan oleh DWP di masing-masing daerah. “Kegiatan

seminar ini merupakan wujud komitmen DWP dalam mendorong lebih lanjut implementasi Permendikbudristek PPKSP dan menciptakan lingkungan pendidikan yang merdeka dari kekerasan,” imbuh Dewi.

Gelaran webinar ini menghadirkan dua sesi diskusi yang membahas tentang urgensi pembentukan TPPK dan Satgas PPKSKP, perkembangan dan apresiasi adanya TPPK dan Satgas PPKSKP yang sudah terbentuk, pentingnya kolaborasi antara Satgas dengan mitra terkait, dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam implementasi PPKSP. Pada sesi pertama, diskusi menghadirkan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti, dan Wakil Ketua LPSK, Livia Istanita DF Iskandar.

Sementara itu, pengisi materi webinar sesi kedua antara lain Inspektur Jenderal Kemendikbudristek, Chatarina Muliana Girsang, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul, Nunuk Setyowati, dan Psikolog, Mario Manuhutu yang membahas tentang tiga pendekatan pencegahan kekerasan yaitu penguatan tata kelola, edukasi, dan penyediaan sarana dan prasarana. Webinar ini juga turut dihadiri para penasihat DWP Instansi Pemerintah Pusat (IPP), Provinsi, Kabupaten dan Kota. (\*)

## Kemendikbudristek Gandeng Dharma Wanita Persatuan Dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Laporan: Yeti

JAKARTA-Kemendikbudristek, melalui Pusat Penguatan Karakter bekerja sama dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP), menyelenggarakan Webinar bertajuk “Peran Dharma Wanita Persatuan dalam Pencegahan dan Penanganan kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan”.

Webinar ini menunjukkan komitmen bersama untuk melakukan pencegahan dan penanganan ke-

kerasan di lingkungan pendidikan secara serius, dan dihadiri oleh pengurus DWP pusat hingga anggota DWP daerah secara luring dan daring di Plasa Insan Berprestasi, Gedung A Kemendikbudristek, dan Zoom Meeting.

“DWP memiliki peran penting dan strategis untuk mendukung implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. Sebagai orang tua, ibu-ibu dapat berperan di komite sekolah untuk terlibat dalam pembentukan dan menjalankan fungsi TPPK. Ibu-ibu juga dapat turut memasti-

kan sekolah binaannya sudah membentuk TPPK, dan untuk DWP tingkat daerah juga dapat mendorong pemerintah daerah di wilayahnya masing-masing agar segera membentuk Satgas PPKSP,” ujar Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim, saat membuka webinar, Jumat (15/3).

Kemendikbudristek terus berkomitmen mewujudkan sistem pendidikan yang merdeka dari kekerasan melalui sejumlah kebijakan yang telah dikeluarkan. Pada tahun 2021, Kemendikbudristek

telah mengesahkan Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta dan mengamanatkan pembentukan Satgas PPKS. Kemudian di tahun 2023, Kemendikbudristek merilis Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yang juga memberikan mandat untuk membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Ke-

Harian Pagi  
**Baubau Post**  
 Kritik, Lugas, Independen  
 Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun saat melakukan tugas jurnalistik  
 Dalam pelaksanaan tugas, wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post  
 Segala Berita yang diterbitkan oleh Baubau Post merupakan tanggungjawab penanggungjawab Redaksi

Pemimpin Umum : Fauzan NWA  
 Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi : Ardi  
 Redpel : Hengky TA  
 Korlip : Hengky T.A  
 Redaktur : Alyakin, Kasrun  
 Reporter : R a h m a n , ,mashuri, Jaya, Azis, , Lisma  
 Layouter : Ririn  
 Pracetak : Aditya  
 Cetak : Jamal  
 Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl. Raya Palagimata, BTN Palagimata, Blok K-L No. 1 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau  
 Tlp. 0402-2814207 - Email : baubaupost2019@gmail.com  
 Percetakan : PT. Faren Grafika, Alamat: Jl. Raya Palagimata Blok K No 01, Kel. Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau

Penerbit : PT. Faren Grafika  
 Komisaris : Erna Agule  
 Direktur Utama : Andina Latief, SKM  
 Manager Keuangan : Nabila D.A  
 Manager Iklan dan Pemasaran : Fauzan  
 Kepala Sirkulasi : Jamal  
 Administrasi : Salvana  
 Security :

Kepala Biro Wakatobi : Risman  
 Kepala Biro Buton Utara : Fauzan  
 Kepala Biro Buton : Rahman  
 Kepala Biro Busel : Salvana  
 Kepala Biro Buteng : Andini  
 Kepala Biro Bombana :  
 Kepala Biro Sultra :  
 Kontributor Baubau : Iphul, Kontributor Sultra : Amat Jr  
 Kontributor Buton : Kontributor Butur : Kasrun,  
 Kontributor Buteng : Hengki TA, Kontributor Busel : Amirul  
 Baubau : Jaya  
 Agen Pasarwajo :  
 Agen Butur : Samrihan  
 Harga Langganan : Dalam Kota Baubau Rp. 100.000,-/ bulan,  
 Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim,  
 Eceran Dalam Kota Baubau : Rp.5.000,-

## Sekda Sultra Asrun Lio Hadiri Rakor Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2024



### Laporan: Hamid

KENDARI, BP-Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sekda Prov. Sultra), Drs. H Asrun Lio., M. Hum., Ph.D, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) program pencegahan korupsi terintegrasi tahun 2024 yang membahas evaluasi MCP dan Tindak Lanjut SPI tahun 2023, serta menyiapkan dokumen/bahan pelaksanaan indikator MCP tahun 2023 di Ruang Rapat Sekda Sultra, (Rabu, 13 Maret 2024).

Hadir dalam kegiatan tersebut, Direktorat Koordinasi Supervisi Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi bersama rombongan, Kepala BPKAD Sultra, Pengawas APIP dari Inspektorat Sultra, Perwakilan BKD Sultra, Perwakilan Bapenda Sultra, Perwakilan DPM dan PTSP Sultra, Perwakilan Diskominfo Sultra, Perwakilan Biro PBJ Setda Sultra

Arahan Sekda bahwa untuk melakukan pemetaan potensi kerawanan korupsi, pada masing-masing pemerintah daerah. Perlu didorong oleh komitmen kepala daerah, pejabat maupun pegawai ASN daerah termasuk forum terkait lainnya dalam mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah sebagai upaya pencegahan korupsi di daerah ini

Lanjut, yang terpenting memberikan saran atau koordinasi kepada pemerintah daerah terkait langkah-langkah kita dalam pengelolaan pemerintahan

Untuk Prov. Sultra, masih pada angka 56,25% pada posisi belum sehingga dikatakan masih rendah, serta diperlukan perhatian bagi para OPD untuk meningkatkan kinerja kita di tahun 2024

Kemudian, Paparan Pencegahan Korupsi pada Pemprov. Sultra, Tri Budi Rochmanto dari Direktorat Koordinasi Supervisi Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa tugas koordinasi KPK pada pasal 8 Undang-Undang (UU) No. 19 Tahun 2019 bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik ada 5 yaitu:

1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemberantasan tindak pidana korupsi
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan Pemberantasan tindak pidana korupsi
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi

yang terkait 4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan

5. Meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi

Tugas Koorsup melaksanakan tugas koordinasi dan supervisi bidang percepatan dan bidang penindakan, serta menyiapkan dan melaksanakan kegiatan yang membutuhkan integrasi dan kolaborasi antara upaya pencegahan serta penindakan maupun fungsi strategis lainnya sesuai dengan kebutuhan

Oleh Karna itu, dalam pencegahan korupsi di Sulawesi Tenggara ada 4 Poin yaitu: Pertama Kinerja Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah berdasarkan hasil penilaian: MCP, SPI, IPAK, LHKPN, Dumas. Kedua, Penyelamatan Barang Milik Daerah dalam capaian dan tantangan. Ketiga, Proses Penganggaran APBD sebagai titik rawan korupsi dan Keempat, Agenda Pemberantasan Korupsi Tahun 2024 untuk kelanjutan 2023 dan fokus 2024

Monitoring Center for Prevention (MCP) adalah aplikasi yang dikembangkan oleh KPK

## Dua Orang Pengedar Narkoba Jenis Shabu di Desa Banubanua Jaya Ditangkap Polres Buton Utara Beserta Barang Bukti



### Laporan: Kasrun

**BURANGA, BP-** Satuan Narkoba (Satnarkoba) Polres Buton Utara berhasil menangkap dua orang pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada 11 Maret 2024 di Desa Banubanua Jaya. Pelaku yang diamankan tersebut berinisial AY (43) dan AS (55) warga Buton Utara.

Kapolres Buton Utara, A.K.B.P. Herman Setiadi melalui Kasat Narkoba, Iptu Anwar mengungkapkan, penangkapan kedua pelaku tersebut berdasarkan informasi dari seorang warga bahwa di Desa Banubanua Jaya sering terjadi transaksi Narkoba jenis shabu. "Kemudian tim lidik satnarkoba melakukan pengamatan dan pembun-

tutan terhadap orang yang diketahui identitasnya," ungkapnya.

Setelah itu, kata Anwar, 3 anggota Satnarkoba melihat 2 orang yang berdasarkan informasi menggunakan kendaraan motor Matic Mio Soul warna Hitam, masuk di dalam pemukiman Bajo dan beberapa menit kemudian dilihat kedua orang tersebut kembali keluar melewati jalan yang sama.

Sehingga 3 anggota Satnarkoba, kata dia, segera mengambil tindakan menghalangi dan menghadang pelaku tersebut di pinggir jalan depan kedai sarabba, lalu melakukan penangkapan, pemeriksaan, dan pengeledahan.

"Ditemukan 1 pipet warna kuning yang berisi saset kecil diduga berisi shabu yang sempat dijatuhkan tepat di bawah motor yang digunak-

an, lalu ditemukan handphone Vivo Y35 warna Hitam, Handphone Vivo warna putih, 1 kaca pirex, dan 1 unit Motor Matic Yamaha Soul dengan nomor polisi DT. 3548 AN, warna Hitam," ujarnya.

Lebih lanjut, kata Anwar, barang bukti beserta dua orang pelaku telah diamankan di Makopres Buton Utara.

"Kedua tersangka diduga melanggar Pasal 112 Ayat (1) Subs Pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," tutupnya. (\*)

untuk memantau capaian kinerja program pencegahan korupsi. MCP merupakan instrumen pemantauan pelaporan pemberantasan korupsi di pemerintah daerah.

Untuk capaian MCP wilayah Sultra tahun 2023, nilai rata Provinsi Sulawesi Tenggara 60% dan total nilai capaian nasional 75%. Skor rata-rata MCP wilayah Sultra: 60% terbagi atas: Perencanaan dan Penganggaran APBD (35%), Optimalisasi Pajak Daerah (69%), PBJ

(86%), Manajemen ASN (59%), Perizinan (56%), Pengelolaan Barang Milik Daerah (38%), Pengelolaan APIP (50%) dan tata kelola keuangan desa (75%)

Dalam capaian MCP Pemda se-Sulawesi Tenggara Tahun 2023 yaitu:

1. Pemkot Kendari dengan Skor (92,19)
2. Pemkab Konawe Utara (86,03)
3. Pemkab Kolaka (83,36)
4. Pemkab Buton Selatan (69,7)
5. Pemkab Konawe (69,43)
6. Pemkab Bombana (67,47)
7. Pemkab Buton (67,32)

8. Pemkab Konsel (61,27)

9. Pemkab Konsep (60,9)

10. Pemkab Buteng (60,61)

11. Pemkot Bau-Bau (60,24)

12. Pemprov. Sultra (56,25)

13. Pemkab Kolut (54,97)

14. Pemkab Koltim (52,13)

15. Pemkab Mubar (48,63)

16. Pemkab Wakatobi (37,25)

17. Pemkab Muna (29,27)

18. Pemkab Butur (21,22)

Pemkot Kendari berada diperingkat 60 nasional dan Pemkab Butur peringkat 536 nasional

Selain itu juga, ca-

paian MCP Pemprov. Sultra tahun 2023, untuk nilai capaian 56% dan rata Prov. Sultra 60%. Serta membahas indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemprov. Sultra tahun 2023, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK), Kepatuhan LHKPN 2023 dalam eksekutif wilayah Sultra dan Data Pengaduan Masyarakat Wilayah Sultra

Dalam Pencegahan Korupsi di Pemerintah Daerah merupakan sebagai ikhtiar perbaikan tata kelola pemerintahan dalam rangka mendorong kemandirian fiskal daerah, mengoptimalkan aparatur pemerintah, memperbaiki layanan publik dan mendefinisikan APBD untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Tutupnya. (\*)

## Pj Wali Kota Baubau Tekankan 3 Poin Penting ke PKK



Pewarta : Amat Jr

BAUBAU, BP-Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si saat peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-52 tingkat Kota Baubau di aula Palagimata Kamis (7/3/2024) mengatakan, ada 3 (tiga) poin penting yang menjadi pesan yakni pertama, sejak TP PKK Kota Baubau dikukuhkan pada 4 November 2023 lalu, PKK telah bergerak dan mampu mengimplementasikan makna Bekerja Bersama dalam berbagai bidang dan aspek pembangunan.

Mulai dari menjadi penggerak di akar rumput untuk memastikan anak bayi balita sehat, terhindar dari stunting, mendapatkan imunisasi, berinovasi memanfaatkan pangan sehat berbagai potensi lokal untuk antisipasi dan pencegahan stunting.

Terlibat dalam Gerakan Literasi Baubau berkolaborasi bersama banyak pihak hingga membangun dan menggalakkan budaya, juga inovasi kebersihan lingkungan melalui Arisan Kelurahan Bersih.

Pemerintah tidak akan mampu menyelesaikan bertumpuk masalah, dan kehadiran PKK adalah solusi penting membantu pemerintah menjangkau akar rumput yang sering tak terjangkau kebijakan, program dan kegiatan.

Pesan kedua, ada

3 (tiga) isu pembangunan yang menjadi target kerja TP PKK Kota Baubau bersama Pemerintah Kota Baubau saat ini, yakni: (1) percepatan penurunan stunting, (2) pengentasan kemiskinan ekstrim dan (3) pengendalian inflasi melalui berbagai upaya, salah satunya adalah Gerakan Tanam Cabai skala rumah tangga dengan memanfaatkan pekarangan.

“Dan ketiga isu itu yang sangat erat kaitannya dengan ketahanan dan kualitas keluarga dimana PKK menjadi motor utama dalam menggerakkan kader dan menjalin koordinasi, beserta sinergitas dengan para stakeholder, baik dengan pemerintah, maupun lembaga non pemerintah lainnya,” ungkapnya.

Sementara untuk pesan ketiga terkait dengan jambore PKK yang telah berlangsung sejak tanggal 4 Maret lalu, dilaksanakan bukan sekadar untuk dimenangkan, tetapi lebih dari itu, Jambore dijadikan sebagai wadah silaturahmi, saling kenal mengenal, berjejaring dan membangun komunikasi efektif, bertukar ilmu, pengalaman dan keterampilan, semua demi membangun ketahanan keluarga.

Jambore PKK juga ini menjadi alat evaluasi bagi pemerintah daerah untuk melihat apa saja kontribusi yang telah diberikan oleh masing-masing OPD sebagai mitra

strategis PKK dan apa saja yang dibutuhkan oleh PKK di masa-masa datang demi menguatkan peran penting di akar rumput. Apa yang dibutuhkan PKK, seperti pelatihan, pendampingan atau berbagai kegiatan penguatan SDM dan manajemen kelembagaan PKK dari OPD teknis yang berdampak kepada meningkatnya kualitas keluarga dan penanganan tiga isu di atas, harus disupport oleh OPD teknis terkait.

Orang nomor satu di Kota Baubau ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader PKK mulai dari Tingkat Kelurahan, Kecamatan hingga Kota yang tetap semangat, dan sportif selama mengikuti rangkaian acara peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK, dan selamat kepada seluruh pemenang lomba yang telah memberikan penampilan terbaik dan semoga membawa hasil gemilang di tingkat provinsi nanti. Apa yang telah dinisiasi dan dikerjakan oleh seluruh Kader PKK Kota Baubau selama ini adalah implementasi dari perempuan dengan ilmu dan kepekaannya terhadap kondisi sosial, termasuk kepekaan dan kontribusi mereka dalam menjawab tantangan Kota Baubau bersama Pemerintah Kota, seperti Percepatan Penurunan Stunting, Pengendalian Inflasi dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrim. (\*)

## Ibu Reffiani Opitmis Rencana Induk Gerak PKK Berjalan Sesuai Target



Pewarta : Amat Jr

**BAUBAU, BP-Rangkaian kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK tahun 2024 tingkat Kota Baubau hanyalah sebagian kecil dari tugas dan tanggung jawab seluruh pengurus dan kader PKK. Tetapi yang menjadi tanggung jawab utama TP PKK Kota Baubau adalah, bagaimana seluruh program dalam rencana induk Gerakan PKK Tahun 2024 yang berkorelasi dengan pemerintah, yakni Penurunan Stunting, Penanganan Kemiskinan Ekstrim dan Pengendalian Inflasi dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan.**

Demikian sambutan Ketua TP PKK Kota Baubau Ibu Reffiani Diwatmo S.T. pada peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG - PKK) Ke-52 Tingkat Kota Baubau Tahun 2024 di aula Palagimata Kamis (7/3/2024).

Menurut Ibu Reffiani Diwatmo, ST, seluruh program rencana induk PKK dapat terlaksana dengan baik apabila semua berkomitmen, mampu bekerjasama antar pengurus dan kader, serta yang tidak kalah penting adalah meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM).

Karena pelaksanaan percepatan Program PKK tidak terlepas

dari aspek kualitas SDM kader PKK di 8 kecamatan dan 43 kelurahan se-Kota Baubau.

Diungkapkan, sebagai Ketua TP PKK Kota Baubau, pihaknya mengapresiasi kerja dan kinerja para pengurus dan kader PKK se-Kota Baubau. “Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk bisa menjalankan tugas dan amanah ini dengan baik. Semoga TP PKK selaku mitra pemerintah, akan terus meniadakan motor penggerak kesejahteraan dalam keluarga, sehingga keluarga yang sejahtera dan berkualitas dapat

tercapai, khususnya di Kota Baubau,” ungkapnya.

Ibu Reffiani Diwatmo Rasman mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader yang tetap semangat dan sportif selama mengikuti seluruh rangkaian acara peringatan HKG Tingkat Kota Baubau, dan selamat kepada seluruh pemenang lomba. Karena setelah ini, TP PKK Kota Baubau akan mempersiapkan keikutsertaan pada ajang Jambore Kader PKK dan HKG Tingkat Provinsi pada akhir April dan selanjutnya HKG Tingkat Nasional pada awal Bulan Mei 2024.

Sementara itu, peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-52 yang merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus TP PKK, mulai dari Tingkat Kota, Provinsi, hingga Tingkat Nasional. Peringatan HKG Tahun ini mengusung Tema : “PKK Kota Baubau Bekerja Bersama untuk Cegah Stunting, Entaskan Kemiskinan Ekstrim dan Kendalikan Inflasi”. Rangkaian kegiatan HKG dilaksanakan sejak Tanggal 4 Maret yang lalu, yakni Jambore Kader PKK dengan beberapa jenis lomba yang diikuti oleh seluruh Kader PKK Kecamatan & Kelurahan dan Gerakan Tanam Cabai (GERTAM CABAI) secara serentak se-Indonesia melalui zoom. Untuk Tingkat Kota Baubau, pelaksanaannya dipusatkan di Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum. (\*)

## Vidio Viral, Kadis Perindag Baubau dan Fitriani Berakhir Damai

Laporan: Andina L

BAUBAU, BP-Persoalan yang terjadi antara Kadis Perindag Kota Baubau H La Ode Ali Hasan, SE, M.Si dengan Fitriani yang kemudian viral vidionya di media massa saat terjadi operasi pasar mu-

rah yang digelar oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah Pemkot Baubau di lapangan Lembah hijau Rabu (6/3./2024), akhirnya berakhir damai.

Kadis Perindag Kota Baubau didampingi istri mendampingi Fitriani di kediaman Fitriani di Kelurahan Tanganapada Kecamatan

Murhum pada Kamis malam (6/3/2024).

Kedatangannya dalam rangka meminta maaf atas nama pribadi dan keluarga terkait apa yang sudah terjadi pada saat pelaksanaan pasar murah di lapangan Lembah hijau pada Rabu (6/3/2024).

Ali Hasan me-

nyadari, apa yang diucapkannya saat itu seharusnya tidak terjadi.

Oleh sebab itu, dirinya berterima kasih kepada Fitriani yang didampingi pihak keluarga karena sudah bersedia menerima kedatangannya bersama istri dalam rangka untuk meminta maaf atas kejadian yang sudah viral di media massa tersebut.

Menanggapi permohonan maaf dari Kadis Perindag Kota Baubau, Fitriani menyatakan menerima permintaan maaf dari Kadis Perindag



Kota Baubau H La Ode Ali Hasan. Bahkan, Fitriani juga menyatakan permohonan maaf apabila ada kata-kata yang salah yang telah diucapkannya pada

saat pelaksanaan pasar murah lapangan Lembah hijau.

“Saya menerima permintaan maaf dari Kadis Perindag Kota Baubau H Ali Hasan . Pokoknya malam ini

saya terima permintaan maaf pak Ali Hasan dan keluarga juga mendampingi dan menyaksikan permintaan maaf H Ali Hasan,” ungkap Fitriani. (\*)